

## Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif

Nafisatun Hasanah<sup>1\*</sup>, Ni'am Khurotul Asna<sup>2</sup>, Sholeh Hasan<sup>3</sup>, Muhamad Ikhsanudin<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nurul Huda

\*E-mail: [nafisa@unuha.ac.id](mailto:nafisa@unuha.ac.id), [niamasna@unuha.ac.id](mailto:niamasna@unuha.ac.id), [sholehhasan@unuha.ac.id](mailto:sholehhasan@unuha.ac.id), [ikhsanudin@unuha.ac.id](mailto:ikhsanudin@unuha.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kontribusi penguatan nilai-nilai demokrasi dalam mewujudkan pendidikan Islam yang bersifat inklusif. Kajian ini menitikberatkan pada penerapan prinsip keadilan, pemerataan akses pendidikan, praktik musyawarah dalam proses pembelajaran, serta sikap toleran terhadap keberagaman sebagai fondasi utama bagi terbangunnya pendidikan Islam yang inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui telaah dan analisis berbagai sumber literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema demokrasi, pendidikan Islam, serta inklusivitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa internalisasi nilai demokrasi secara sistematis mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang partisipatif, adil, serta menghargai perbedaan individu tanpa diskriminasi. Penguatan nilai demokrasi tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter peserta didik yang toleran, bertanggung jawab sosial, dan siap hidup dalam masyarakat multikultural. Dengan demikian, pendidikan Islam berbasis nilai demokrasi menjadi strategi penting yang inklusif dalam membangun sistem pendidikan yang berkeadilan dan berkeadaban.

**Kata kunci:** Nilai Demokrasi, Pendidikan Islam, Inklusif.

### PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia menjadi pribadi yang berpengetahuan, berakhlak baik, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai media pembentukan peradaban yang adil dan beradab. Pendidikan Islam diarahkan pada terwujudnya kebaikan, kedamaian, dan kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, suku, maupun status sosial. Oleh sebab itu, pendidikan Islam tidak seharusnya hanya berfokus pada proses penyampaian pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga pada penanaman nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial sebagai dasar dalam membangun kehidupan yang harmonis, terbuka, dan saling menghargai (Arifin, 2025). Penguatan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam merupakan upaya strategis untuk mewujudkan sistem pendidikan yang humanis, inklusif, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan menyampaikan pendapat, persamaan hak, penghargaan terhadap perbedaan, toleransi, dan musyawarah selaras dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut perlu diintegrasikan secara komprehensif dalam proses pembelajaran, pengelolaan pendidikan, serta budaya sekolah guna menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman (Martina et al., 2023). Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai media penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial menuju masyarakat yang demokratis, harmonis, dan berkeadilan.

Demokratisasi dalam pendidikan Islam menuntut penerapan pendekatan yang menekankan partisipasi, keterbukaan, dan persamaan. Setiap individu diberi ruang untuk berperan aktif dalam proses belajar-mengajar serta diberdayakan untuk mengembangkan potensi dirinya tanpa diskriminasi. Pendidikan yang demikian mencerminkan semangat Islam yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan menghormati keberagaman ciptaan Allah. Konsep ini menegaskan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa batasan sosial, budaya, maupun agama (Kurniallah & Suharti, 2016). Melalui pendidikan yang berlandaskan nilai demokrasi, Islam berupaya menumbuhkan kesadaran kemanusiaan yang utuh, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong terciptanya masyarakat yang saling menghargai, setara, dan berkeadilan (M. A. Hermawan, 2015). Dengan demikian, penguatan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam tidak hanya penting dalam ranah akademik, tetapi juga

menjadi faktor utama dalam membangun peradaban Islam yang damai dan inklusif di era modern.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengkaji bagaimana penguatan nilai-nilai demokrasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan Islam yang inklusif, baik dari aspek filosofis, normatif, maupun praksis. Diharapkan pembahasan ini mampu memberikan gambaran tentang relevansi nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam serta menjadi dasar dalam mengembangkan model pendidikan Islam yang lebih terbuka, adil, dan berkeadaban.

### **METODE/EKSPERIMEN**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian yang menggunakan sumber literatur di antaranya buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya (Rukminingsih, 2020). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam konsep penguatan nilai demokrasi dalam perspektif pendidikan Islam serta keterkaitannya mewujudkan pendidikan inklusif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur ilmiah, termasuk buku, artikel jurnal, hasil studi sebelumnya, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan demokrasi, pendidikan Islam, dan pendidikan Islam inklusif. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber yang kredibel. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi yang dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama, sumber dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut relevansinya dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu memilih informasi yang substansial dan sesuai dengan tujuan kajian. Tahap ketiga adalah interpretasi dan sintesis data, yakni mengkaji keterkaitan antar konsep untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penguatan nilai demokrasi dalam pendidikan Islam inklusif. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan kerangka konseptual yang sistematis mengenai peran nilai demokrasi sebagai strategi dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang adil, partisipatif, dan menghargai keberagaman.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

#### **Demokrasi Pendidikan Islam**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan oleh rakyat, dan pelaksanaannya dilakukan langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan yang mereka pilih melalui sistem pemilihan yang bebas. (Budiardjo, 2008). Demokrasi didefinisikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Konsep demokrasi berangkat dari keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki kebebasan. Dari kebebasan itulah mereka berhak mengemukakan pendapat dan menentukan arah hidupnya. Namun, keberagaman pendapat dan pandangan inilah yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan. Untuk menjaga harmoni tersebut, demokrasi menekankan pentingnya dialog dan musyawarah agar berbagai pandangan dapat dipertemukan dalam kesepahaman bersama (Madjid, 2019).

Dalam konteks pendidikan Islam, demokrasi dipahami sebagai pendekatan yang menekankan Nilai demokrasi seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan partisipasi diterapkan dalam pendidikan inklusif sesuai ajaran Islam. Pendidikan Islam yang berbasis Nilai demokratis menekankan pemberian akses pendidikan yang setara bagi seluruh individu tanpa diskriminasi berdasarkan aspek sosial, ekonomi, gender, maupun kemampuan (Martina et al., 2023). Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan Islam yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Hasil kajian literatur juga menemukan bahwa Demokratisasi pendidikan Islam merujuk pada upaya mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berlandaskan prinsip-prinsip demokratis yang selaras dengan nilai serta ajaran Islam. Prinsip demokrasi dalam pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi Islam dalam praktik penyelenggaraan pendidikan (Vandita & Saputra, 2024). Salah satu prinsip utamanya adalah pengakuan terhadap kebebasan individu dalam menikmati hak-haknya, sekaligus menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat

dan warga negara. Melalui penerapan prinsip tersebut, pendidikan diharapkan dapat menciptakan perkembangan masyarakat (*community development*) yang menghargai keberagaman baik dalam berpikir, bertindak, berpendapat, maupun dalam berkreaitivitas.

Selain itu, Prinsip demokrasi dalam pendidikan Islam meliputi nilai inklusi, partisipasi, keadilan, dan kesetaraan. *Pertama*, Prinsip inklusi menekankan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. *Kedua*, prinsip keadilan dalam Islam memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi distribusi sumber daya secara proporsional, perlindungan hak peserta didik, serta pemberian peluang belajar yang setara bagi semua. *Ketiga*, demokratisasi pendidikan menuntut partisipasi aktif siswa, orang tua, guru, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan pendidikan mempertimbangkan berbagai perspektif. *Keempat*, Prinsip kesetaraan menegaskan hak yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi gender, etnis, dan status sosial (Usri, 2021).

Nilai-nilai demokrasi dalam Al-Qur'an tidak dinyatakan secara eksplisit sebagaimana konsep demokrasi dalam pemikiran politik modern. Nilai yang dapat diidentifikasi dalam Al-Quran yang relevan dengan konsep demokrasi. *Pertama*, adalah nilai keadilan. Pendidikan Islam menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pemberian akses pendidikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan meliputi pemerataan kesempatan, distribusi sumber daya secara proporsional, serta perlindungan terhadap hak-hak peserta didik agar dapat berkembang secara optimal (Nasrulloh & Zulkarnain, 2023). Al-Qur'an secara tegas menempatkan keadilan sebagai prinsip universal yang harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, hukum, dan pendidikan. Prinsip ini selaras dengan nilai demokrasi yang menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam menjamin kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga, serta mencegah terjadinya penindasan dan ketidakadilan struktural (Martoyo et al., 2025).

*Kedua*, Nilai Kebebasan. Al-Qur'an menghormati kebebasan individu, khususnya dalam berpikir, berkeyakinan, dan menyampaikan pendapat. Kebebasan berpikir serta menyampaikan pendapat juga menjadi landasan utama dalam dunia pendidikan, karena melalui kebebasan inilah lahir sikap kritis, dialogis, dan keterbukaan terhadap perbedaan pandangan, yang semuanya merupakan ciri masyarakat demokratis. *Ketiga*, Nilai Toleransi. Al-Qur'an mengajarkan sikap toleransi dalam berkehidupan khususnya dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan pandangan. Toleransi bukan berarti menyamakan semua ajaran, melainkan menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya tanpa intimidasi atau pemaksaan. Dalam konteks demokrasi, toleransi menjadi prasyarat terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif.

*Keempat*, Nilai Musyawarah. Musyawarah menekankan partisipasi, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Nilai ini sejalan dengan praktik demokrasi yang menempatkan dialog dan kesepakatan sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Dari konsep musyawarah ini, Islam memperkenalkan nilai-nilai yang sejalan dengan demokrasi, seperti partisipasi, kebebasan, dan kesetaraan dalam proses politik (Musa, 2014). Umat Islam menyepakati bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip utama ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kebebasan, toleransi, dan musyawarah memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan pendidikan Islam yang bersifat inklusif. Melalui pengintegrasian nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari Al-Qur'an, pendidikan Islam diharapkan mampu mewujudkan lingkungan pembelajaran yang adil, terbuka, menghargai keberagaman, serta mendorong partisipasi seluruh warga pendidikan.

### **Pendidikan Islam Inklusif**

Berdasarkan hasil kajian literatur, jika menelisik dulu mengenai pendidikan inklusif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan, adaptif, dan mampu merespons keberagaman peserta didik. Secara konseptual, pendidikan inklusif menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas dalam lingkungan belajar

yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, maupun kondisi lainnya (Rohalia, 2025). Pendidikan inklusif hadir sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa membedakan kondisi fisik, kemampuan kognitif, latar belakang sosial, maupun budaya, memperoleh hak serta kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, pendidikan inklusif berperan penting sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus ataupun anak dari keluarga kurang mampu.

Sikap inklusif berlawanan dengan eksklusivisme, yaitu pandangan yang mengunggulkan superioritas suatu kelompok serta menolak kelompok lain yang berbeda. Eksklusivisme kerap mendorong munculnya klaim kebenaran yang sifatnya absolut sehingga menjadi legitimasi bagi tindakan diskriminasi atau pemaksaan keyakinan terhadap orang lain (Baihaki, 2018). Sebaliknya, inklusivitas menekankan pemahaman terhadap keberagaman sebagai bagian dari kemuliaan manusia yang harus dijaga. Alwi Shihab dalam karyanya *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* menjelaskan bahwa sikap inklusif dalam Islam tercermin melalui penerimaan terhadap keberadaan pemeluk agama lain tanpa mencampuradukkan akidah. Islam mengajarkan sikap toleransi dan keterbukaan kepada pemeluk agama lain, sebagaimana sikap penghargaan terhadap tradisi Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an. Nilai inklusif ini bertujuan membangun kemaslahatan bersama sebagai bagian dari misi Islam yang rahmatan lil 'alamin (Shihab, 1997)

Kurikulum inklusif mempertimbangkan keragaman peserta didik, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi secara maksimal, serta mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kesetaraan, keadilan, dan sikap saling menerima. Beberapa opsi implementasi pendidikan Islam inklusif yang secara umum dapat diterapkan melalui beberapa upaya yakni penggunaan kurikulum inklusif dalam Islam. Beberapa langkah dalam pengembangan kurikulum inklusif dapat dilakukan dengan menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan individu agar mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, nilai-nilai Islam seperti kesetaraan, keadilan, penerimaan, dan empati diintegrasikan ke dalam seluruh aspek pembelajaran. Kurikulum juga perlu menyediakan berbagai peluang belajar yang memungkinkan peserta didik berkembang secara menyeluruh, baik dalam keterampilan sosial, emosional, maupun keterampilan praktis untuk kehidupan sehari-hari. (Afi Parnawi; Malika Syahrani, 2024).

Lebih jauh dari optimalisasi pendidikan melalui lembaga pendidikan formal dan informal dapat diajak untuk mengeksplorasi nilai-nilai pendidikan inklusif dalam semangat dakwah Islam yang hari ini marak diikuti oleh semua kalangan. Metode dakwah inklusif dapat ditemui melalui beberapa tokoh agama dan kiai seperti Gus Baha, Habib Husein Ja'far, Gus Iqdam, Gus Miftah dan lain sebagainya. Dengan demikian, pendidikan Islam inklusif tidak hanya berfokus pada pemberian akses pendidikan yang merata, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Peserta didik dibimbing untuk siap untuk hidup dalam keberagaman, menjunjung kesetaraan, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Nilai-nilai inklusif ini merupakan bukti nyata bahwa Islam mengedepankan prinsip persaudaraan universal, kedamaian, dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

### **Penguatan Nilai-nilai Demokrasi dalam Mewujudkan Pendidikan Islam Inklusif**

Kajian literatur menemukan bahwa penguatan nilai demokrasi dalam pendidikan Islam merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman serta menjamin kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik (Choirul Mahfud, 2016). Oleh karena itu, sebagai bentuk pendidikan yang ideal, pendidikan Islam perlu merancang model dan desain pembelajaran yang inovatif guna mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi secara efektif. Realisasi nilai demokrasi dalam pendidikan Islam inklusif dilakukan melalui berbagai pendekatan yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

#### **1. Kesetaraan Akses Pendidikan**

Kesetaraan akses pendidikan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan pendidikan Islam inklusif berbasis nilai demokrasi. Praktik pendidikan yang eksklusif dan diskriminatif bertentangan dengan hakikat pendidikan sebagai upaya membebaskan serta memberdayakan

potensi manusia (Tilaar, 1999). Dalam konteks pendidikan Islam inklusif, prinsip kesetaraan selaras dengan konsep *al-musāwah* yang menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu menghadirkan kebijakan, sarana, dan layanan pembelajaran yang fleksibel serta mampu menyesuaikan dengan beragam kebutuhan peserta didik. Upaya tersebut mencerminkan komitmen pendidikan Islam dalam mengimplementasikan nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan.

## 2. Musyawarah dalam Proses Pembelajaran

Musyawarah (*asy-syūrā*) merupakan salah satu nilai demokrasi yang memiliki peran penting dalam pendidikan Islam inklusif. Dalam ajaran Islam, musyawarah tidak hanya diterapkan dalam urusan pemerintahan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam Q.S. Asy-Syura [42]: 38 menegaskan bahwa musyawarah merupakan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan pada nilai keadilan dan kebersamaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Zamroni yang menegaskan bahwa pendidikan seharusnya dikembangkan sebagai ruang dialog yang menghargai perbedaan, mendorong keterlibatan aktif, dan membangun kesadaran kolektif dalam kehidupan sosial (Zamroni, 2011).

Implikasi utama dari prinsip musyawarah dalam pendidikan Islam mencakup beberapa sikap penting. *Pertama*, adanya kesiapan untuk membahas berbagai persoalan secara bersama-sama. *Kedua*, keberanian untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. *Ketiga*, kesediaan untuk mendengarkan pandangan orang lain. *Keempat*, munculnya sikap saling menghormati serta menerima perbedaan pendapat, baik antar peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru. *Kelima*, kedewasaan dalam menyadari bahwa sebagian bahkan seluruh pendapat pribadi mungkin tidak diterima dalam musyawarah (Martina et al., 2023). Dengan demikian, prinsip musyawarah dalam pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk sikap demokratis, saling menghargai, serta tanggung jawab dalam proses pembelajaran.

## 3. Toleransi dan Penghargaan terhadap Keberagaman

Toleransi (*tasāmuḥ*) menjadi pilar penting dalam pendidikan Islam inklusif yang berlandaskan nilai demokrasi. Pendidikan Islam harus menanamkan sikap saling menghormati perbedaan, baik dalam aspek budaya, pemikiran, maupun kondisi individual peserta didik. Sikap toleran ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan terbebas dari tindakan diskriminatif. Dalam Islam, toleransi merupakan wujud nyata dari ajaran Islam yang menekankan nilai kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dalam kehidupan sosial, sikap toleransi menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan Islam juga berfokus pada pembentukan sikap sosial yang humanis serta berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Integrasi nilai toleransi dengan prinsip demokrasi dalam pendidikan Islam inklusif dapat memperkuat kesadaran peserta didik akan pentingnya keadilan sosial dan persatuan. Oleh karena itu, toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi unsur kunci dalam mewujudkan pendidikan Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial serta mampu menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

## Pembahasan

### Demokrasi Pendidikan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi merupakan pendekatan pendidikan dalam rangka mewujudkan nilai demokratis yang sesuai dengan cita-cita pendidikan Islam inklusif. Dalam ranah pendidikan, demokrasi dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengarahkan proses belajar dan pembentukan nilai-nilai baik pendidikan meliputi kesetaraan, keadilan, kebebasan, musyawarah, dan toleransi sebagai dasar sekaligus fondasi dalam praktik pengajaran (Rosyad & Indramayu, 2020). Implementasi nilai-nilai demokrasi menempati kepentingannya sendiri untuk menghalau permasalahan dalam lembaga pendidikan (M. Iqbal, Paizaludin, 2022).

Temuan ini sejalan dengan pandangan Na'imah dan Bawani bahwa demokrasi dalam bidang pendidikan merujuk pada sistem pengajaran untuk setiap orang dalam masyarakat memiliki hak mendapatkan kesempatan yang adil untuk mencapai pendidikan yang adil serta merata (Na'imah & Imam Bawani, 2021). Sebagaimana dengan agenda pendidikan Islam yang demokratis yang tujuannya untuk menciptakan individu yang merdeka berpikir, mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat, serta

adanya rasa menghargai perbedaan pendapat. Mencapai proses ini melibatkan dua aspek utama yakni pendidikan demokrasi serta demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan mencakup implementasi prinsip-prinsip demokrasi pada saat proses belajar mengajar. Sementara pendidikan demokrasi berfokus pada sosialisasi nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik (Dzu Hulwin, Ghina Mutmainnah, Hafizah Irfani Azkiah & Muhyi, 2023).

Implementasi demokrasi pendidikan hakikatnya tidak semata berorientasi pada pemberian kebebasan belajar kepada peserta didik, tetapi juga mencakup partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Latifah, Siti Imroatul, 2025). Penerapan nilai-nilai demokrasi, guru dan peserta didik perlu memahami bahwa salah satu syarat dalam penyelenggaraan pendidikan yang sepatutnya dijunjung adalah sikap menghargai dan menghormati sesama (Abror & Abror, 2020). Artinya, nilai-nilai demokrasi memang tercermin dalam segala proses pendidikan. Akan tetapi, identifikasi nilai-nilai demokrasi belum sepenuhnya dipahami.

Dalam proses pendidikan, implementasi demokrasi harus dipraktikkan kepada peserta didik. Dalam mata pelajaran agama Islam, peserta didik dapat diberikan pemahaman mengenai teori maupun praktik bagaimana mereka dapat saling terbuka, menghargai, dan menghormati kepada sesama yang berbeda. Konsep tersebut bertujuan supaya cita-cita demokrasi dalam pendidikan Islam dapat tercapai untuk semua pihak yang tertuju pada lingkungan belajar yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Rujukan mengenai pentingnya demokrasi dalam pendidikan telah sejalan dengan ajaran Islam dan diterapkan sejak masa Nabi Muhammad Saw melalui musyawarah dalam membuat keputusan, berpartisipasi, serta menghargai setiap individu yang terlibat (Rizki, Muhammad, Samsul Bahri, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Anwar Kasful bahwa demokrasi dalam pendidikan Islam mengacu pada penerapan berbagai prinsip demokrasi dalam pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam (Anwar Kasful, 2023).

Sebagaimana dijelaskan oleh (Cintya, Tengku Dara, Muhammad Riduan Harahap, 2023) walaupun istilah demokrasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an atau hadits, prinsip-prinsip dasar yang meliputi kebebasan, kesetaraan, dan keadilan merupakan bagian yang melekat dalam ajaran Islam. Pandangan tersebut selaras dengan kandungan Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan, berbuat kebajikan, serta memberi kepada kerabat, dan melarang perbuatan keji, kemungkaran, serta permusuhan.

### **Pendidikan Islam Inklusif**

Berdasarkan temuan literatur, prinsip serta nilai demokrasi dalam pendidikan Islam secara mendasar menyatu dengan konsep pendidikan Islam inklusif sebagai upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan yang ideal. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasim Amir, hakikat pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat ideal, yang berorientasi pada pendekatan integralistik, humanistik, pragmatis, serta berlandaskan budaya yang kokoh (Nasrulloh, 2023). Sebab demikian, pendidikan inklusif dalam Islam menekankan prinsip keterbukaan dan demokrasi, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membdakan latar belakang mereka (Parnawi & Syahrani, 2024).

Temuan ini mengindikasikan bahwa perhatian pendidikan Islam inklusif dengan mengintegrasikan demokrasi pendidikan Islam bertujuan untuk menolak dan menghindari sikap eksklusivisme yang bertentangan dengan sikap inklusif. Pertentangan tersebut dapat ditinjau melalui pandangan Mulyadhi Kartanegara yang menjelaskan nilai-nilai madani sebagai usaha membangun masyarakat kosmopolit yang menolak sikap eksklusivisme.

Pertama, inklusivisme yang bersifat terbuka terhadap berbagai unsur dari luar melalui kemampuan mengapresiasi sekaligus menyeleksi secara konstruktif. Kedua, humanisme didefinisikan sebagai perspektif yang mengutamakan nilai kemanusiaan daripada ras, kasta, kekayaan, atau agama. Egalitarianisme berkaitan erat dengan sikap humanis yang menempatkan setiap manusia pada derajat yang setara. Selanjutnya, toleransi dimaknai sebagai kelapangan hati dalam menghargai dan menyikapi perbedaan. Adapun demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan berpikir serta kesempatan untuk menyampaikan kritik secara terbuka (Mulyadhi Kartanegara, 2007).

Konsep demokrasi dalam pendidikan Islam yang berorientasi pada sikap inklusif menuntut adanya

reorientasi paradigma, baik pada aspek tujuan, materi, metode, maupun media pembelajaran. Seluruh unsur tersebut perlu diarahkan secara strategis untuk membangun pemahaman keberagaman peserta didik dan masyarakat yang bersifat inklusif-pluralis. (Erlan Muliadi, 2011).

Temuan dari gagasan Alwi Shihab mengenai karyanya yang berkenaan dengan inklusivitas tidak merusak akidah dalam aplikasinya, tetapi justru melalui rasa penerimaan terhadap keberagaman akan menampakkan nilai-nilai pendidikan Islam inklusif yang aplikatif berlandaskan demokrasi. Sejalan dengan pandangan Mundzier Suparta, keberadaan Pendidikan Agama Islam pada era reformasi perlu dipahami sebagai solusi strategis yang menawarkan paradigma baru. Pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan suasana pendidikan yang demokratis, tata kelola yang baik, penegakan negara hukum, serta terbentuknya masyarakat sipil yang relevan dengan tuntutan global (Mundzier Suparta, 2014).

Implementasi pendidikan Islam inklusif sejalan dengan lima tugas pendidikan Islam dari gagasan M. Amin Abdullah untuk menjadi inklusif dan aplikatif dalam menghadapi keragaman agama. *Pertama*, memberikan penjelasan tentang ajaran Islam klasik dan memperkenalkan berbagai masalah modern yang dihadapi umat Islam. *Kedua*, tujuan utama ajaran Islam adalah menyelesaikan hubungan antarmanusia yang tidak harmonis. *Ketiga*, membuat ajaran Islam relevan dengan perubahan zaman. *Keempat*, berbicara tentang kecenderungan pendidikan agama yang hanya berfokus pada kognitif. *Kelima*, menyatakan bahwa Islam tidak hanya berusaha untuk membangun moralitas pribadi, tetapi juga untuk meningkatkan moralitas masyarakat (M. Amin Abdullah, 2010).

Sejalan dengan konteks ini, Pendidikan Agama Islam harus menekankan nilai-nilai universal Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan. Dalam rangka mewujudkan transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral Pendidikan Agama harus lebih menekankan transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral daripada sekadar memberikan pengetahuan agama (kognitif). Kegagalan pendidikan penelitian (Zaiyd & Fahri, 2023) yang menjelaskan bahwa pemahaman mendalam konseptual dan aplikatif terhadap ajaran Islam memiliki korelasi positif terhadap tingkat toleransi beragama peserta didik.

### **Penguatan Nilai-nilai Demokrasi Dalam Mewujudkan Pendidikan Islam Inklusif**

Temuan literatur dapat dipahami bahwa nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam diarahkan untuk memastikan setiap individu memperoleh peluang yang setara dalam berkembang serta memberikan kontribusi yang konstruktif bagi kehidupan masyarakat (Ali Miftakhur Rasyad, n.d.). Hasil kajian literatur kembali menegaskan bahwa demokrasi dalam pendidikan Islam dipahami sebagai implementasi nilai-nilai fundamental yang mencakup keadilan, keterbukaan, kesetaraan, kebebasan, dan toleransi.

Nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam inklusif dilakukan melalui beberapa realisasi. Temuan literatur menunjukkan ada tiga pendekatan penting, di antaranya meliputi kesetaraan dalam akses, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Kesetaraan akses merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjamin bahwa setiap orang memiliki peluang yang setara untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dengan memberikan akses yang adil, kelompok yang kurang mampu dapat menikmati akses yang setara dalam pendidikan, sehingga memungkinkan mereka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

Selain itu, lebih mendalam, akses yang setara sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan akses yang setara, setiap orang memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam aktivitas politik, sosial, dan ekonomi sehingga mereka dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang menguntungkan semua orang. Dalam pendidikan inklusif, kesetaraan dapat diupayakan tercapai dengan tiap individu dari peserta didik memperoleh akses yang setara dalam kesempatan belajar dan pengembangan diri (Parnawi et al., 2024).

Di sisi lain, kesetaraan akses berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih makmur dengan memperluas kesempatan ekonomi bagi individu yang kurang beruntung. Pendidikan yang merata memungkinkan mereka untuk berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital atau sektor-sektor baru yang berkembang. Hal ini terkait dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi.

Hak untuk memperoleh pendidikan yang setara dijamin dalam Pasal 5 ayat (1). Ketentuan ini sekaligus menekankan urgensi pemerataan akses, peningkatan mutu, serta relevansi pendidikan dalam menjawab dinamika dan tantangan global (Eni Irawati & Weppy Susetyo, n.d.). Oleh karena itu, sila keempat menegaskan demokrasi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam berbangsa dan bernegara (Kamil et al., 2023). Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. (Nugraha, 2021). Prinsip syura atau musyawarah menjadi dasar penting yang mencerminkan semangat demokrasi karena keputusan diambil melalui dialog yang melibatkan berbagai pihak. (Dewi Muthmainah, 2018).

Selain itu, sikap penerimaan juga terhubung dengan sikap toleransi sebagai pendekatan mewujudkan pendidikan inklusif. Penerimaan menuntut sikap mengakui dan menghargai keberagaman individu dengan semangat kebersamaan tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, maupun kebutuhan. Dalam perspektif Islam, nilai ini tercermin melalui ajaran kasih sayang, pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian dari ciptaan Allah serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dengan adanya sikap penerimaan dan toleransi menjadi dasar terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan sesuai untuk semua peserta didik. Melalui prinsip penerimaan, semua peserta didik. Pendidikan inklusif berupaya membangun budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai empati, toleransi, dan saling menghormati (Nata, 2016).

Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif untuk semua peserta didik didasarkan pada perspektif penerimaan dan toleransi. Berlandaskan prinsip tersebut, pendidikan inklusif diarahkan untuk membangun budaya sekolah yang mengedepankan empati, toleransi, serta sikap saling menghormati. Secara strategis, pendidikan Islam memiliki kemampuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut melalui kurikulum yang berfokus pada penguasaan pengetahuan selain pembentukan moral dan etika.

Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, pendidikan inklusif dalam perspektif Islam menegaskan keadilan, kesetaraan, penerimaan, toleransi, dan musyawarah sebagai nilai-nilai fundamental dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa pengecualian. Ketiga prinsip, ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi tetapi juga pada penghormatan terhadap martabat manusia, pemenuhan hak belajar setiap individu, serta penciptaan lingkungan pendidikan yang adil, setara, dan ramah terhadap keberagaman. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada proses transisi pengetahuan; itu juga memperhatikan martabat manusia dan memberikan hak peserta didik untuk belajar, serta membangun lingkungan pendidikan yang egaliter, setara, dan inklusif.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa demokrasi dalam sistem pendidikan mengandung konsep serta nilai-nilai humanis dan progresif yang berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan Islam yang inklusif. Gagasan dan konsep demokrasi yang mengindikasikan adanya kebebasan, keadilan, kesetaraan, toleransi, dan partisipasi sejalan dengan nilai-nilai inklusif yang juga mensyaratkan keterbukaan terhadap keberagaman dan potensi sosial terhadap toleransi maupun pluralisme. Realisasi penguatan atas konsep demokrasi dan pendidikan Islam inklusif mencita-citakan proses belajar peserta didik komprehensif dengan dukungan dan bantuan ajaran pendidik berintegritas. Dalam Islam, sikap inklusif memperkuat rasa menghormati dan kesadaran pentingnya hidup berdampingan dalam suasana damai dengan membawa prinsip-prinsip demokratis yang menguntungkan proses pendidikan. Nilai-nilai demokrasi dalam rangka mewujudkan pendidikan Islam inklusif perlu dilakukan dengan menyiapkan kurikulum inklusif dengan pelaksanaannya yang memungkinkan muncul cerminan nilai-nilai Islam universal, perdamaian, dan keadilan bagi sesama. Pendidik juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran dari kemauan belajar dan memberdayakan diri dan sekitar. Meskipun pelaksanaan dari keberhasilan tercapainya konsep dan nilai inklusif yang diharapkan memerlukan proses yang memungkinkan waktu yang panjang dan implementasi kondusif, namun praktik dan nilai harus tetap diajarkan pendidik kepada peserta didik

baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal dalam masyarakat.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengelola Jurnal Al-I'tibar atas dukungan dan kerja samanya dalam proses penerbitan artikel berjudul "Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif".

### DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M., & Abror, M. (2020). *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman memiliki sifat universal dan komprehensif. Sifat inilah yang kemudian*. 1(2), 143–155.
- Afi Parnawi; Malika Syahrani. (2024). Pendidikan Inklusif dalam Islam Untuk Membangun Kesetaraan dan Keadilan. *Jurnal Arriyadhah*, XXI(1).
- Ali Miftakhur Rasyad, M. M. . (n.d.). Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna*, 3(1).
- Anwar Kasful, S. (2023). Demokrasi Dalam Pendidikan. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 4(3).
- Arifin, Y. (2025). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Rusdianto, Ed.). IRCiSoD.
- Baihaki, E. S. (2018). Konflik Internal Umat Islam: Antara Warisan Sejarah dan Harapan di Masa Depan. *FIKRAH*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v6i1.2606>
- Choirul Mahfud. (2016). *Politik Pendidikan Islam ( Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Orde Baru )*. Pustaka Pelajar.
- Dara Cintya, T., Riduan Harahap, M., & Zualiana, E. (n.d.). *Nilai-Nilai Demokrasi Pendidikan Dalam Islam (Studi Pemikiran Prof Al Rasyidin)*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cintya, Tengku Dara, Muhammad Riduan Harahap, and E. Z. (2023). Nilai- Nilai Demokrasi Dalam Islam (Studi Pemikiran Prof Al Rasyidin). *Jurnal ANSIRU PAI*, 7(2).
- Dewi Muthmainah. (2018). *Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Sikap Dan Kepribadian Siswa*. 6(2), 44–53.
- Dzu Hulwin, Ghina Mutmainnah, Hafizah Irfani Azkiah, A. A., & Muhyi. (2023). Pandangan Al-Qur'an tentang Demokrasi: Analisis Tafsir Maudhu'i. *Gunung Djati Conference Series, Volume 25 (2023) Seminar Isu Kontemporer ISSN: 2774-6585 Website: <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdc>, 25*.
- Eni Irawati & Weppy Susetyo. (n.d.). Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1).
- Erlan Muliadi. (2011). Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 55–68.
- Ediyanto, E., Sunandar, A., Hastuti, W. D., & Ramadhani, R. S. (2021). *Landasan dan Konsep Pendidikan Inklusi: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi: 1 (1)*. Yayasan Pusat Pendidikan Angstrom.
- Kurniallah, N., & Suharti, S. (2016). Pendidikan Islam Berbasis Inklusifisme dalam Kehidupan Multikultur. *Jurnal Penelitian*, 10(1), 201–232.
- Kamil, Y., Ojtaviani, R., & Seprinaldi, M. F. (2023). *Musyawahar Sebagai Landasan Demokrasi Dalam*. 6(September), 237–245.
- Latifah, Siti Imroatul, Q. K. (2025). Demokrasi Dalam Pendidikan Islam : *DIROSAT*, 10(1), 75–85.
- M. Amin Abdullah. (2010). *Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka*. Suka Press.
- M. Iqbal, Paizaludin, S. (2022). Jurnal Contemplate Lembaga Penelitian dan Jurnal Contemplate Lembaga Penelitian dan. *Kesilaman, Jurnal Studi-Studi Qur, I A I Al- Ilir, Ogan Selatan, Sumatera*, 3(02), 58–70.
- Mulyadhi Kartanegara. (2007). *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons terhadap Modernitas*. Erlangga.

- Mundzier Suparta. (2014). Pendidikan Transformatif Menuju Masyarakat Demokratis. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2). <https://doi.org/10.15642/islamica>
- M. A. Hermawan. (2015). Islam Inklusif Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam SLTA. *Jurnal Penelitian Agama*, 16(2), 180–198.
- Madjid, N. (2019). *Islam Dokrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (M. W. Nafis, Ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Martina, Fitri Sarinda, Dwi Noviani, & Hilmin Hilmin. (2023). Demokratisasi Pendidikan Dalam Islam. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 153–166. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.775>
- Martoyo, Akla, & Zainal Abidin. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Konteks Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(2), 229–240. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i2.772>
- Muliadi, E. (2012). Urgensi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Membangun kesadaran inklusifmultikultural untuk deradikalisasi pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 131. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.131-151>
- Musa, A. M. (2014). *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam terhadap Isu-Isu Aktual*. Serambi Ilmu Semesta.
- Na'imah, I., & Imam Bawani. (2021). Penanaman pendidikan karakter demokratis di pondok pesantren. *Muara Pendidikan*, 6(2).
- Nasrulloh, L. (2023). *Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. 15(1), 273–289.
- Nugraha, D. (2021). Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren. *Jurnal Al-Amar*, 2(1).
- Nata, A. (2016). *Pendidikan dalam Perspektif al-Quran*. Kencana.
- Parnawi, A., & Syahrani, M. (2024). *Pendidikan Inklusif dalam Islam Untuk Membangun Kesetaraan dan Keadilan*. XXI(1), 79–87.
- Rizki, Muhammad, Samsul Bahri, N. K. (2021). *Konsepsi Demokrasi menurut Al-Qur'an*. 6(2), 283–300.
- Rosyad, A. M., & Indramayu, U. W. (2020). *Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia*. 3(1), 75–99.
- Rohalia, Z. (2025). Strategi Pendidikan Inklusif Dan Penguatan Mutu Dalam Mewujudkan Kesetaraan Pendidikan Nasional. In *Al-Muqaddimah* (Vol. 1, Number 1).
- Rukminingsih, G. A. M. A. L. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Peneitian Kuantitatif Penelitian Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas*. Erhaka Utama.
- Shihab, A. (1997). *Islam inklusif: Menuju sikap terbuka dalam beragama*. Mizan.
- Tilaar, H. A. R. (1999). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia*. Remaja Rosdakarya.
- Usri. (2021). Pendidikan Islam dan Demokrasi. *AL-MUTSLA*, 1(2), 82–104. <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.10>
- Vandita, L. Y., & Saputra, H. (2024). Demokrasi dalam Perspektif Islam. *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 545–552. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i2.2628>
- Zamroni. (2011). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Gavin Kalam Utama.
- Zaiyd, M., & Fahri, A. (2023). *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Toleransi Beragama pada Siswa di Era Multikultural*. 3, 8581–8590.